

**EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA DI PANTAI LUMBAN BULBUL BALIGE
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

**OLEH:
YESSI MELIAKI SIMARINGGA
188520168**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/1/23

**EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PENGELOLAAN
OBJEK WISATA DI PANTAI LUMBAN BULBUL BALIGE
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik

Univeristas Medan Area

Oleh :

YESSI MELIAKI SIMARINGGA

188520168

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/1/23

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua OrangTua, Keluarga, Dosen, Sahabat, Teman, dan semua pihak yang telah bertanya:

“Kapan Sempro?”, “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”, “Kapan Nyusul?” dan lain sejenisnya.

Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan Skripsi ini.

**DAN SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN JUGA UNTUK
PENDAMPING HIDUP SAYA. (kelak)**

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Pantai
Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba
Nama : Yessi Meliaki Simaringga
NPM : 188520168
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing


Agung Suharyanto, S. Sn. M.Si
Pembimbing I


Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Pembimbing II




Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Khairunnisah Lubis, S. Sos, M.I.Pol
Ka. Prodi Adm. Publik

Tanggal Lulus : 08 September 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 08 September 2022



Yessi Meliaki Simaringga
188520168

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YESSI MELIAKI SIMARINGGA

NPM : 188520168

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini


(YESSI MELIAKI SIMARINGGA)

ABSTRAK

Pantai Lumban Bulbul adalah salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Balige yaitu di salah satu Desa Lumban Bulbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam mengelola objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupten Toba. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori William M. Dunn yang mengelompokkan evaluasi kebijakan dalam 6 indikator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dalam mengelola objek wisata Pantai Lumban Bulbul sudah mencapai hasil yang baik dalam meningkatkan struktur ekonomi masyarakat. Sedangkan efisiensi dalam membentuk UPS (Unit Pengelola Sampah) guna meningkatkan kebersihan Pantai Lumban Bulbul tidak sepenuhnya tercapai karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kecukupan Sumber Daya Manusia di Desa Lumban Bulbul ini masih rendah terbukti dengan redahnya tingkat anak usia sekolah dalam hal pendidikan karena kebiasaan bekerja di usia muda. Hal ini juga berkaitan dengan perataan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang tidak tepat sasaran yaitu yang seharusnya melibatkan masyarakat namun hanya melibatkan pihak tertentu saja. Responsivitas masyarakat dalam meningkatkan wisata Pantai Lumban Bulbul masih rendah dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan karena rendahnya kesadaran. Wisata Pantai Bulbul ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat namun Ketepatan dalam mengelola pantai belum terlaksana karena dampak buruk yang ditimbulkan pada kualitas air yang kian menurun. Ada beberapa hambatan dalam proses pengembangan pantai Lumban Bulbul ini salah satunya adalah pencemaran Danau Toba karena eceng gondok dan limbah dari masyarakat, kekurangan dana dalam pembangunan sarana dan prasarana dan yang terakhir adalah tidak adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pariwisata

ABSTRACT

Lumban Bulbul Beach is one of the attractions in Balige District, namely in one of the Lumban Bulbul Villages. This tourism has a big role in improving the economy in Lumban Bulbul Village which before the existence of the community's standard of living was still low and had less income in fulfilling their daily life, one of which was in education. This research aims at the policy of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in managing the Lumban Bulbul Beach tourism object, Balige, Toba Regency. The theory used in this study is the theory of William M. Dunn which groups policy evaluation into 6 indicators. The method used in this study is a descriptive qualitative method with data collection Observation, Interview and Documentation. The results showed that the effectiveness in managing the Lumban Bulbul Beach tourism object had achieved good results in improving the economic structure of the community. Meanwhile, efficiency in establishing UPS (Waste Management Unit) to improve the cleanliness of Lumban Bulbul Beach was not fully achieved due to lack of public awareness. The adequacy of Human Resources in Lumban Bulbul Village is still low as evidenced by the low level of school age in terms of education due to the habit of working at a young age. This is also related to the distribution of training in order to improve Human Resources which is not right on target, namely those that should involve the community but only involve certain parties. The community's responsiveness in increasing Lumban Bulbul Beach tourism is still low and the responsibility in maintaining cleanliness is due to low awareness. This Bulbul Beach Tourism has a good impact on the community, but the accuracy in managing the beach has not been carried out because the bad impact on air quality is decreasing. There are several strengths in the process of developing the Lumban Bulbul beach, one of which is the pollution of Lake Toba due to water hyacinth and waste from the community, lack of funds in the construction of facilities and infrastructure and the last is the lack of cooperation between the community and the government.

Keywords: *Evaluation, Policy, Tourism*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yessi Meliaki Simaringga dilahirkan di Simpang Bage, pada tanggal 14 mei 2000 dari ayah Kariawan Jarlinson Simaringga dan ibu Rasida Maralani Girsang. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Tahun 2012 penulis lulus dari SDN 095167 Simpang Bage Kabupaten Simalungun, tahun 2015 penulis lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Silimakuta Kabupaten Simalungun, tahun 2018 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Swasta Yapim Merek Kabupaten Karo dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan internal yaitu menjadi Bendahara UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Taekwondo Universitas Medan Area periode 2019/2020. Penulis juga pernah mengikuti kepanitiaan pada acara Debat yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) pada tahun 2019. Penulis juga aktif di Organisasi Ikatan Mahasiswa Batak Toba (IMABATO)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kesehatan, dan kasih karunia-Nya yang selalu berlimpah setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dari penyusunan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.Sc selaku ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak Agung Suharyanto, S. Sn. M.Si selaku dosen pembimbing I yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Segenap Tenaga Kependidikan Universitas Medan Area yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis
8. Kedua orangtua penulis Bapak Kariawan J Simaringga dan Alm. Ibu Rasida Girsang yang paling berpengaruh dalam perjalanan penulis selama kuliah serta dukungan moril dan materil. Sekalipun Ibunda dari penulis telah berpulang pada saat penulis sedang dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kedua saudara penulis Rony vey Andreas Simaringga dan Brian Lee Simaringga yang senantiasa memberi bantuan dan dukungan kepada penulis
10. Seluruh teman-teman Kontrakan Biru Dewi, Indah, Lasma, Rosnita, Silvia, Rotayu dan Kak Yani yang sudah memberikan dukungan kepada penulis
11. Seluruh teman-teman organisasi dari Imabato (Ikatan Mahasiswa Batak Toba) Yanti Silalahi dan Nova Samosir yang memberikan motivasi kepada penulis
12. Kepada seluruh senior penulis dari UKM Taekwondo Universitas Medan Area yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman stambuk 2018 kelas Bilingual Prodi Administrasi Publik, yang telah berjuang bersama penulis dan memberi banyak pelajaran serta pengalaman berharga selama ini di Universitas Medan Area.

14. Bapak Ir. Jhon Pitter Silalahi selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba yang sudah memberikan ijin peneliti dan juga membantu kelancaran peneliti ini.
15. Ibu Melva Panjaitan selaku Kepala Desa Lumban Bulbul Balige yang sudah memberikan ijin untuk penelitian serta informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.
17. *Last but not least, i wanna thank me, for believing in me for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 5 April 2022

Yessi Meliaki Simaringga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Kebijakan Publik.....	6
a. Definisi Kebijakan Publik	7
b. Kerangka Kebijakan Publik	8
c. Karakteristik Kebijakan Publik	8
d. Proses Kebijakan Publik	9
e. Evaluasi Kebijakan Publik	10
f. Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	11
2.2 Kebijakan Pariwisata.....	12
a. Definisi Kebijakan Pariwisata.....	12
b. Pengelolaan Objek Wisata	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28

3.5 Informan Penelitian.....	30
3.6 Instrumen Penelitian.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
4.2 Potensi Pantai Lumban Bulbul.....	52
4.3 Fasilitas Pantai Lumban Bulbul	54
4.4 Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lumban Bulbul balige	57
4.5 Faktor Penghambat Dalam Proses Pengembangan Objek Wisata Pantai Lumban Bulbul	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor kepala desa Lumban Bulbul Balige.....	38
Gambar 2. Struktur organisasi Kantor Kepala Desa Lumban Bulbul	40
Gambar 3. Pantai Lumban Bulbul Balige	41
Gambar 4. Fasilitas penginapan di desa Pantai Lumban Bulbul Balige	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar tujuan wisata di kawasan Danau Toba.....	3
Tabel 2. Waktu Penelitian	28
Tabel 3. Data Penduduk Desa Lumban Bulbul Balige Tahun 2022	39
Tabel 4. Hasil Evaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009...	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan wawancara	71
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	73
Lampiran 3. Surat rekomendasi penelitian dan surat selesai penelitian.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Perkembangan pariwisata di Indonesia tak terlepas dari perkembangan pariwisata di dunia. Indonesia khususnya para pelaku bisnis kepariwisataan harus dapat secara sistematis memperkenalkan aset-aset keparawisaataan Indonesia, termasuk budaya lokal, sumber daya alam dan manusia demikian juga dalam hal jasa dan barang. Pengembangan pariwisata pertama kali dilakukan melalui Repelita I tahun 1969, pemerintah mengeluarkan suatu keputusan mengenai pengembangan kepariwisataan Nasional, dengan tujuan dapat meningkatkan kunjungan wisata sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi pendapatan negara maupun masyarakat sebagai pelaku usaha industri pariwisata

Masyarakat Indonesia harus dapat memanfaatkan keadaan Indonesia yang kaya akan alam dan keanekaragaman budaya tersebut, untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun lokal. Selain pariwisata menjadi sumber devisa negara kegiatan wisata juga berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Contohnya saja adalah ketika pemerintah melihat sebuah objek wisata memiliki potensi yang besar untuk menarik perhatian khususnya wisatawan dari belahan dunia maka pemerintah akan mengambil kesempatan untuk menambah devisa negara. Yaitu dengan melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum yang mendukung kegiatan objek

wisata. Perbaikan itu tentunya selain untuk kegiatan wisata dapat juga untuk pengembangan dan pembangunan Nasional.

Usaha pengembangan pariwisata di Indonesia juga terus diperbaiki, terbukti bahwa selalu lahir undang undang yang mengatur masalah pembangunan, pemasaran pariwisata, sampai pada usaha menjaga kelestarian objek pariwisata itu sendiri. UU yang mengatur pengelolaan pariwisata diawali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang mengatur pengelolaan pariwisata dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah tujuan wisata selain Bali, NTT, Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, potensi wisata yang dimiliki Sumatera Utara sangat beragam mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata agro tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Salah satu objek wisata yang paling disorot oleh publik yaitu wisata Danau Toba. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan objek wisata pariwisata ini juga bertujuan untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba melalui peningkatan kemampuan dan kreativitas sumber daya manusianya melalui pengelolaan objek wisata yang benar dan efektif. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Tabel 1.1 Daftar tujuan wisata di kawasan Danau Toba

No	Kawasan Danau Toba	Nama Objek Wisata
1	Kabupaten Samosir	Bukit Holbung, pusuk Buhit, Menara Pandang Tele, Tomok, Ambarita, Pasir Putih Parbaba, Pantai Indah Situkkir, Batu Hoda, Sigurgur Beach, Pantai Sibolazi dll
2	Kabupaten Toba	Pantai Lumban Bulbul Balige, Pantai Sibolahotang, Sunset Beach, Pasir Putih Parparean, Tara bunga, Air Terjun Situmurun, Pantai Meat, Pantai Pakkodian, Air Terjun Siboruan, Museum TB Silalahi dll
3	Kabupaten Simalungun	Bukit Indah Simarjarunjung, Pantai Bebas Parapat, Pantai Paris Tigaras, Wisata Anugrah SIPPAN, Binahal Indah Resort, Bukit Sipolha, Kebun Teh Sidamanik, Tinggi Raja, Air Terjun Tonduhan, Pemandian Aek Alam Manik dll
4	Kabupaten Karo	Air Terjun Sipiso-piso, Tongging, Taman Simalem Resort, Taman Alam Lumbini, Tahura, Bukit Kubu, Gundaling, Wisata Kuliner Panatapan, Air Terjun Sikulikap, Pasar Buah Berastagi, Gunung Sibayak, Air Panas Pariban dll.
5	Kabupaten Dairi	Paropo, Silalahi, Bukit Siattar Atas, Danau Sicike-cike, Pemandian Lau Timah, Tigalingga, Puncak Sidiangkat, Taman Wisata Iman Sitingjo, Parhonasan dll
6	Tapanuli Utara	Huta Ginjang, Pulau Sibaganding, Air Panas Sipoholan, Air Soda Parbubu, Salib Kasih, Tugu Aritonang dll
7	Humbang Hasudutan	Sipinsur, Tuan Nagani Paradise, Desa Wisata Tipang, Air Terjun Simolap, Air Terjun Pollung, Air Terjun Janji, Tombak Sulusulu, Pemandian Aek Sitio-tio, Aek Sipangolu Bakkara

Danau Toba merupakan salah satu danau terluas di Indonesia yang mana danau ini berada di Provinsi Sumatera Utara dan Danau Toba ini juga menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utarayang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Danau Toba dikelilingi oleh tujuh kabupaten yang berada di pinggiran Danau Toba dimana salah satunya adalah Kabupaten Toba. Salah satu kecamatan yang memiliki pantai yang cukup populer di kalangan wisatawan adalah Pantai Lumban Bulbul yang berada di desa Lumban Bulbul, Balige Kabupaten Toba. Pantai ini mulai berkembang semenjak Danau Toba ditetapkan menjadi destinasi unggulan nasional. Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo

berkunjung ke Balige dan disaat itu juga objek wisata Pantai Lumban Bulbul mulai diperhatikan. Pantai ini memiliki tempat makan yang menyediakan kuliner khas Batak, penginapan, transportasi dan berbagai jasa lainnya yang dikelola oleh masyarakat. Dari berbagai jenis jasa dan barang yang disediakan oleh masyarakat maka akan menjadi peluang usaha yang akan berkembang dalam perputaran ekonomi terkhusus di Kabupaten Toba ini. Untuk itu strategi pemerintah diperlukan agar pengelolaannya bisa membuat pendapatan masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2020) jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara pada bulan Januari 2020 mencapai 20.539 kunjungan, kemudian mengalami penurunan 14,82 persen dibanding wisatawan yang datang pada bulan Desember 2019 mencapai 24.113 kunjungan. Demikian jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara pada bulan Januari 2020 mengalami kenaikan 17,57 persen, dari 17.470 kunjungan pada bulan Januari 2019 menjadi 20.539 kunjungan. Penurunan jumlah wisatawan tersebut membuat pendapatan masyarakat semakin menurun. Untuk itu pemerintah berperan dalam upaya mengembangkan agar jumlah wisatawan kembali meningkat terkhusus di objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige. Selain jumlah wisatawan yang menurun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai di objek wisata Pantai Lumban Bulbul seperti tidak adanya pelayanan kesehatan di objek wisata dan tidak ada transportasi umum dengan trayek tetap menuju lokasi objek wisata. Keadaan ini dimungkinkan terjadi pada kondisi objek wisata yaitu daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata dan upaya pengembangan Pantai Lumban

Bulbul yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, sehubungan dengan itu perlu dikaji kondisi objek wisata Pantai Lumban Bulbul dan upaya pengembangan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti, maka masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dalam pengembangan objek wisata di Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dalam mengembangkan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba?

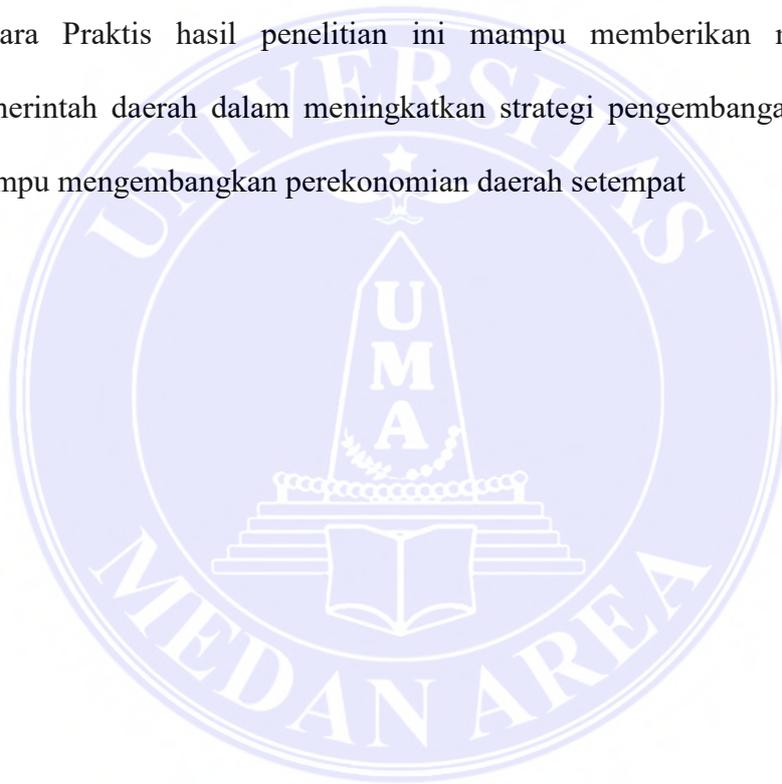
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dalam pengembangan objek wisata di Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan dalam mengembangkan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas uraian teoritis dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2. Secara akademis hasil penelitian ini mampu memperluas dan menambah wawasan dibidang Studi Implentasi Kebijakan dalam program pendidikan Administrasi Publik
3. Secara Praktis hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan strategi pengembangan wisata agar mampu mengembangkan perekonomian daerah setempat



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingann publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat aau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang memiliki sistem politik suatu negara.

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Dun (1999: 24-25) mengatakan bahwa:

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkanan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Untuk mengetahui penegertian kebijakan publik ini, menurut Suharto (2008: 44) yang mengutip dari Young & Quinn (2002) terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu:

- a) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik merupakan upaya yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.
- b) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- e) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dibuat oleh sebuah instansi pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

b. Kerangka Kebijakan Publik

Selanjutnya Soebarsono (2005: 6-8) menuliskan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut:

- a) Tujuan yang akan dicapai. Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit

mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.

- b) Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan sekitarnya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.

c. Karakteristik Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki karakteristik menurut Hairia (2004:17) dalam (Anggraini, 2010) sebagai berikut:

- a) Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkait. Kebijakan publik merupakan rangkaian atau terdiri atas banyak keputusan.

Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat selalu diikuti oleh petunjuk pelaksanaannya yang juga merupakan kebijakan publik, dan kebijakan tersebut harus saling terkait satu sama lain.

- b) Kebijakan publik merupakan konsep, asas, atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Kebijakan publik dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan 1 (satu) kegiatan tertentu, misalnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakan merupakan suatu pedoman bagi Petugas Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan lapangan.
- c) Kebijakan Publik merupakan satu kegiatan yang dinamis. Kebijakan publik selalu berkembang mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga kebijakan tersebut tidak statis.
- d) Kebijakan Publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

d. Proses Kebijakan Publik

Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a) Formulasi masalah (*problem formulation*) Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b) Formulasi kebijakan (*formulation*) Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

- c) Penentuan kebijakan (*Adoption*) Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- d) Implementasi (*implementation*) Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e) Evaluasi (*evaluation*) Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Howlet dan Ramesh (1979:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berarti penilaian menurut Wirawan (2012: 7) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut. Wirawan (2012: 16-18) Membedakan jenis jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu

1. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru, umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternative kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternative kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

2. Evaluasi Program

Adalah kegiatan atau aktifitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program, metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Evaluasi Proses (*process evaluation*)

- b. Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*)
 - c. Evaluasi akibat (*impact evaluation*)
3. Evaluasi Proyek

Sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program

4. Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu.

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Evaluasi SDM atau dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources development. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (Subarsono, 2011: 124) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni

- a) Evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai

hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya

- b) Evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya. dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
- c) Evaluasi proses keputusan terotitis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasilhasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Secara umum Dunn (Nugroho, 2009:671) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut.

- a) Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? –
- b) Efisiensi; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c) Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- d) Perataan; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- e) Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok tertentu?
- f) Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

f. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. William Dunn (1998: 608-609) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

2.2 Kebijakan Pariwisata

a. Definisi Kebijakan Pariwisata

Menurut KBBI menyatakan bahwa Pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan sebuah perjalanan rekreasi, turisme, pelancongan. Meyers (2017:21-22) menyatakan bahwa Pariwisata ialah suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan sebuah alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah yang melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.

Penelitian ini tentang kebijakan pariwisata dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Toba Samosir, sangatlah penting dilakukan karena terkait kebijakan pemerintah tentang program pembangunan nasional di Indonesia bahwa pengembangan pariwisata merupakan sektor unggulan dan menjadi kunci pembangunan. Kehidupan bernegara di wilayah hukum harus disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kehidupan masyarakat di negara yang tidak memiliki suatu ketentuan kebijakan, maka hidupnya tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara karena dapat mengatur kerangka kerja secara optimal.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho (2017: 73) adalah alat dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai *social beliefs about goodness*-nya. Pemecahan masalah dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003: 21) terdapat beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu:

- a. Penetapan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*) Dalam tahap ini memiliki 4 (empat) tahapan yaitu pencarian masalah, pendefenisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah adalah analisis batasan masalah, analisis

klarifikasi, analisis hirarki, dan brainstorming, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*) Pada tahapan ini dapat digunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan yang diperoleh dari posisi yang tidak dapat ditentukan serta informasi yang terbatas. Tahapan ini juga menggunakan prosedur *forecasting* untuk memecahkan masalah yang terkandung konsekuensi pada setiap kebijakan yang dipilih.
- c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*) Tahapan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah yang terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan masyarakat luas.
 - 2) Pengidentifikasi kriteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.
 - 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.
- d. Isi Kebijakan (*Policy Implementation*) Tahapan ini merupakan tahapan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan yang ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur.
- e. Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*) Tahapan ini dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan melalui proses

implementasi yang dinilai sesuai dengan yang telah ditentukan dan direncanakan dalam program kebijakan tersebut.

Tangkilisan (2003: 26) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, secara umum ada tiga aspek yang diharapkan dari seseorang analis atau evaluator kebijakan yaitu:

- a. Aspek perumusan kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan.
- b. Aspek implementasi kebijakan, dimana analisis atau evaluator berupaya mencari jawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan.
- c. Aspek evaluasi dimana analisis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan. Tingkatan dalam proses kebijakan publik yang dapat mengukur dan memberikan penilaian bahwa program yang dilaksanakan berhasil atau tidak adalah evaluasi.

Paul S. Biederman berpendapat Antariksa (2016:8) bahwa kebijakan pariwisata mendefinisikan arah atau tindakan yang harus dilakukan negara tertentu, wilayah, lokalitas, atau rencana tujuan individu saat mengembangkan atau mempromosikan pariwisata. Prinsip utama kebijakan pariwisata adalah memastikan bahwa negara (wilayah atau wilayah) dapat memperoleh manfaat semaksimal mungkin dari kontribusi ekonomi dan sosial pariwisata. Tujuan akhir dari kebijakan pariwisata adalah untuk memperbaiki kemajuan bangsa (wilayah atau wilayah) dan kehidupan warganya.

Secara umum, kebijakan kepariwisataan sebagai bagian dari kebijakan Negara yang berpengaruh positif terhadap kondisi daerah dan pertumbuhan

ekonomi. Kebijakan pariwisata di Indonesia, di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang bertujuan untuk melakukan perubahan di sektor pariwisata yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

b. Pengelolaan Objek Wisata

Sektor pariwisata dinyatakan sektor unggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perolehan devisa. Tidak hanya di Indonesia, pariwisata juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara.

Ratman (2016:4) mengemukakan bahwa pariwisata sebagai kunci pembangunan dilandaskan pada:

- a. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur;
- b. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia;
- c. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 25 juta orang (1950), 278 juta orang (1980), 528 juta orang (1995) dan 1,1 milyar orang (2014).

Antariksa (2016:16) berpendapat dan mendefinisikan tourism sebagai Sebagai sebuah proses, aktivitas dan segala hasil yang muncul dari hubungan antar pemangku kepentingan di bidang tersebut, termasuk wisatawan itu sendiri. Mendefinisikan konsep pariwisata, tergantung kepada tujuan dan perspektif yang dilihat dari keilmuan seseorang. Demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah interaksi banyak orang yang meliputi, pemerintah, masyarakat, wisatawan, kelompok organisasi dan kelompok bisnis yang menjadi sebuah sistem dalam kegiatan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi pada bagian kebijakan.

Pengelolaan objek wisata pada konsep pariwisata di kenal dengan istilah *Destination Management Organization* (DMO), secara praktik bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata. Konsep ini juga dianggap sebagai perwujudan prinsip tata kelola dalam memecahkan masalah-masalah publik yang berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan. DMO sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan objek wisata karena konsep ini dianggap instrumen manajemen dalam sistem pembangunan destinasi pariwisata.

Rosita et al (2016) mengartikan DMO sebagai sebuah konsep pengelolaan dalam sistem pengelolaan kawasan berbasis kewilayahan/daerah yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen secara internal dan eksternal, koalisis dan kerjasama (*stakeholder*) serta sistem pengelolaan pariwisata. DMO merupakan pengelolaan destinasi pariwisata secara terpadu dan terstruktur yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementas,

pengendalian organisasi serta memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi dan jejaring dalam pengembangan pariwisata.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Andi Meegie Senna (2014) melakukan penelitian berjudul, “*Analisis Potensi Pariwisata Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Palopo*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palopo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya seperti mempromosikan objek-objek wisata melalui berbagai media baik cetak seperti koran dan majalah wisata, maupun elektronik seperti stasiun televisi dan promosi langsung seperti ikut kegiatan pameran dan expo. Mengembangkan sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang epat dan efektif tentang kepariwisataan, workshop pengembangan SDM dan studi banding ke beberapa daerah yang sukses di bidang pariwisata dan bekerjasama dengan pihak swasta baik itu dalam pengelolaan dan mempromosikan objek wisata. Selain itu dampak langsung yang dirasakan bagi masyarakat sekitar objek wisata seperti membuka lapangan pekerjaan, memberi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menambah pendapatan sehari-hari dengan cara berdagang atau menjual jajanan khas kota palopo, menawarkan produk kerajinan tangan lokal di kawasan objek

wisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan potensi pariwisata adalah faktor pendukung yaitu lokasi yang cukup strategis, budaya, tersedianya sarana dan prasarana sedangkan faktor penghambat yaitu potensi yang belum dikelola secara serius, promosi dan pengembangan pariwisata yang masih kurang, sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang Universitas Sumatera Utara kepariwisataan masih terbatas, terbatasnya anggaran sektor pariwisata, sarana dan prasarana pendukung di objek-objek wisata kurang memadai.

2. Wawan Kurniawan (2015) melakukan penelitian berjudul, “*Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*”. Hasil penelitian menunjukkan peluang usaha di sekitar objek pariwisata Umbul Sidomukti termasuk dalam kategori tinggi. Masyarakat sekitar memanfaatkan situasi ini untuk berdagang, jasa tourleader hingga menjadi karyawan objek pariwisata Umbul Sidomukti. Peningkatan pengunjung pasca renovasi Objek Pariwisata Umbul Sidomukti benar-benar mampu meningkatkan pengunjung dan mempengaruhi peningkatan pendapatan. Pembangunan Umbul Sidomukti berhasil menyerap banyak tenaga kerja mengingat banyak wahana baru yang disediakan, pembangunan Objek Wisata Umbul Sidomukti benar-benar mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Tidak hanya tenaga kerja di sektor pariwisata saja yang terserap, kenaikan omset penjualan yang dialami para pedagang di sekitar Umbul Sidomukti juga memaksa para pedagang untuk menambah karyawannya, lambat laun jumlah pengangguran di sekitar Objek Wisata Umbul Sidomukti mulai menurun. Penurunan jumlah pengangguran dan

peningkatan pendapatan masyarakat ternyata berdampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Walaupun demikian aroma persaingan usaha antar sesama pedagang makin terasa.

3. Dewi Kusuma Sari (2011) melakukan penelitian berjudul "*Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*". Peneliti mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan pengunjung obyek wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang dengan analisis regresi linier berganda. Mengestimasi besarnya nilai ekonomi yang diperoleh pengunjung obyek wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang dengan menggunakan perhitungan surplus konsumen. Menentukan strategi upaya pengembangan obyek wisata Pantai Sigandu dengan wawancara mendalam dengan pihakpihak terkait dan menggunakan Analisis Hierarki Proses (AHP).
4. M. Juramadi Efram (2006) melakukan penelitian berjudul, "*Analisis Pasar Pariwisata Dalam Pembangunan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*". Hasil penelitian menunjukkan Potensi wisata yang berkembang dan menjadi andalan Kota Tanjungpinang pada saat ini adalah wisata sejarah dan budaya yang berpusat di Pulau Penyengat dan wisata religi di Senggarang. Jenis wisata ini dominan dipilih dan menjadi daya tarik wisatawan dari Singapura dan Malaysia untuk datang berkunjung. Di samping itu melihat kondisi geografisnya yang merupakan wilayah perairan dan kepulauan maka wisata bahari dan alam merupakan potensi wisata yang juga dapat dikembangkan. Namun perhatian ke arah ini masih kurang dari pemerintah Kota Tanjungpinang dan pihak swasta. Motivasi kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke Kota Tanjungpinang adalah untuk berlibur. Dalam

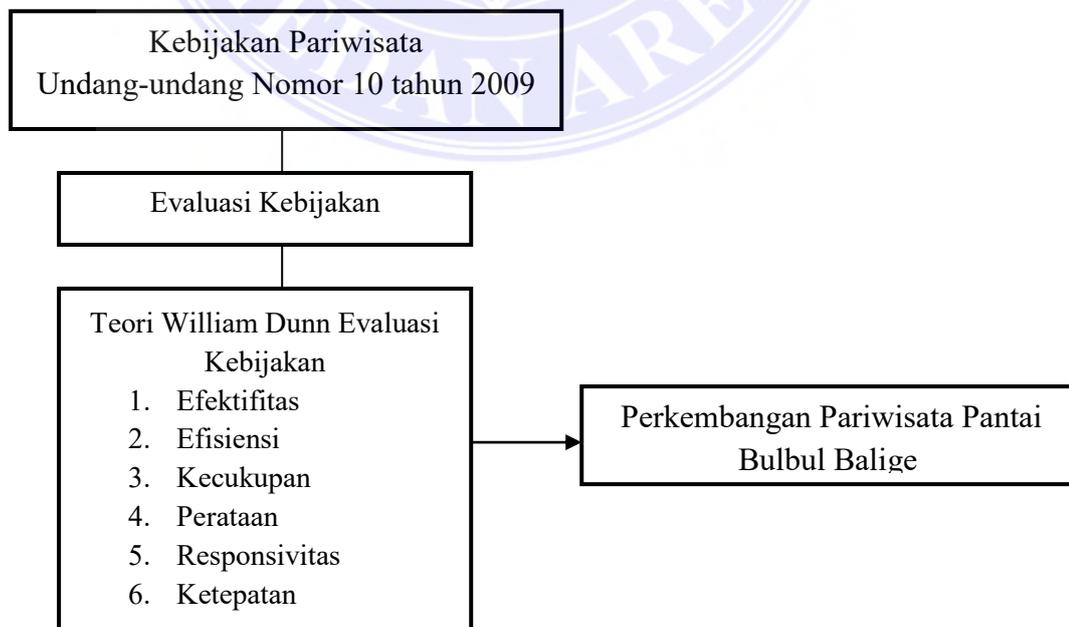
liburan itu pada umumnya mereka melihat bangunan bersejarah yang ada di lokasi wisata Pulau Penyengat, Senggarang, dan Kota Piring.

5. Nadiasa, Maya dan Norken (2010) melakukan penelitian berjudul “*Analisis Investasi Pengembangan Potensi Pariwisata Pada Pembangunan Waduk Jhem Di Kabupaten Bangli*”. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil analisis finansial, pengembangan potensi wisata ini memberikan tambahan benefit dalam dua puluh tahun umur investasi. Analisis sensitivitas pada model yang paling tidak menguntungkan dimana kondisi pendapatan turun 10% dan biaya-biaya yang dikeluarkan juga meningkat 10%. Agar kelangsungan obyek wisata Waduk Jhem ini bisa bertahan dengan identitasnya sebagai obyek wisata berbasis alam/ekowisata, maka kelestarian alam dan lingkungan di sekitar objek senantiasa harus dijaga dan diupayakan konservasinya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pariwisata Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang ada di kabupaten Toba dari kebijakan yang mengatur pengelolaan objek wisata yang ada di pantai Lumban Bulbul Balige sebagai salah satu industri sumber pendapatan masyarakat. Evaluasi kebijakan pariwisata tersebut dapat dilihat dari Seberapa jauh keterlibatan masyarakat setempat dalam proses tersebut, bagaimana perkembangan kebijakan tersebut Meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata ini akan mendorong pembangunan wilayah maupun pembangunan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan distribusi hasil pertanian dan komoditi lainnya. Desa Lumban Bulbul ini dulunya adalah desa

yang memiliki penghasilan yang rendah dari hasil bertani dan juga mencari ikan di Danau Toba, sehingga membuat taraf kehidupan masyarakat masih rendah. Pantai Lumban Bulbul ini berkembang semenjak tahun 2016 pada saat itu juga masyarakat memiliki perputaran ekonomi yang semakin baik. Semakin banyaknya peluang usaha sehingga pendapatan masyarakat yang dulunya hanya seorang petani dan nelayan kini mereka mulai membuka usaha jasa bagi wisatawan. Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menuliskan tentang tujuan kepariwisataan yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Penelitian ini menggunakan teori William Dun menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni Efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan



Tabel 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2016: 19) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prodeur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Di Desa Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba Sumatera Utara. Pantai Lumban Bulbul yang berada di Balige, berjarak 18 kilometer dari Bandara Silangit. Dari Bandara Silangit, dapat menempuh perjalanan menggunakan mobil atau motor yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan. Untuk menuju pantai ini, bisa menggunakan kendaraan sewaan atau kendaraan umum.

3.2.2 Waktu Penelitian

Rentang waktu yang akan digunakan dalam proses penelitian ini berkisar satu bulan.

No	Uraian Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
		2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Penyusunan Proposal									
2	seminar Proposal									
3	Perbaikan Proposal									
4	Pengambilan Data Peneliti									
5	Penyusunan Skripsi									
6	Seminar Hasil									
7	Perbaikan Skripsi									
8	Sidang Meja Hijau									

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh peneliti (Arikunto, 2013: 172). Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh informan. Peneliti juga menambahkan data berupa rekaman suara dan dokumentasi.

Sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek data tersebut diperoleh.

Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer, menurut Umar (2013: 42): “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.
2. Data Sekunder, menurut Indrianto dan Supomo (2013:143): “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dari para pelaku usaha dan juga masyarakat setempat yang terlibat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang

sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Yang dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu melalui buku-buku mengenai pariwisata.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

1. Observasi

Menurut Pasolong (2013:131): “Observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti”. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan riset ditempat yang telah ditentukan. Peneliti melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam pengelolaan wisata Pantai Lumban Bulbul, kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lainnya. Hasil observasi tersebut menunjukkan faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan wisata Pantai Lumban Bulbul.

2. Metode Wawancara

Menurut Pasolong (2013:132): “wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”. Namun demikian wawancara juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada seperti telepon dan internet. Wawancara dilakukan sebagai tanya jawab atau tatap muka perorangan dengan melakukan pertemuan peneliti dengan informan. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawabanjawabannya sendiri.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, untuk memenuhi penelitian. Peneliti juga akan menggunakan alat bantu rekaman suara untuk melakukan sesi wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan melakukan pendekatan kepada orang yang bersangkutan dan mengenal lebih dalam karakter dari seseorang tersebut. Hasil wawancara tersebut nantinya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari kebijakan pariwisata yang dibuat selama ini dalam pengelolaan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian. Setelah melakukan observasi dan wawancara langkah selanjutnya peneliti akan mengambil beberapa video dan foto sebagai bukti peneliti telah melakukan wawancara untuk mengumpulkan data. adapun video dan foto yang diambil berasal dari narasumber baik itu dari para pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah setempat.

3.5. Informan Penelitian

Informan merupakan komponen penting yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung informasi terkait dengan permasalahan penelitian. (Sugiyono, 2016: 300)

1. Informan inti merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25) Ibu Melva Panjaitan (Kepala desa)
2. Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono, 2019: 25) maka bapak Parluhutan Simangunsong Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan ibu Herlina Situmorang (sekretaris desa)
3. Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019: 25) Bapak Tigor S, ibu Risma Simatupang, bapak Lambok Simangunsong, dan ibu S. Simanjuntak (Pemilik usaha permainan air, *Homestay* dan warga setempat)

3.6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen berupa alat-alat bantu untuk menulis dan merekam untuk melakukan wawancara tanya jawab yang akan dilakukan oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dengan menggunakan pedoman observasi dan wawancara, dengan alat bantu perekam seperti

handphone, buku catatan, kamera untuk melakukan sesi tanya jawab dengan informan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2019: 482) merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus (Patilima, 2005: 107). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Pantai Bulbul Balige. Maka peneliti akan mengelola informasi yang didapatkan dari berbagai informan baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Dari hasil pemilihan info tersebut maka peneliti akan menggolongkan info mana yang perlu dan tidak perlu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono (2019: 49) Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige.

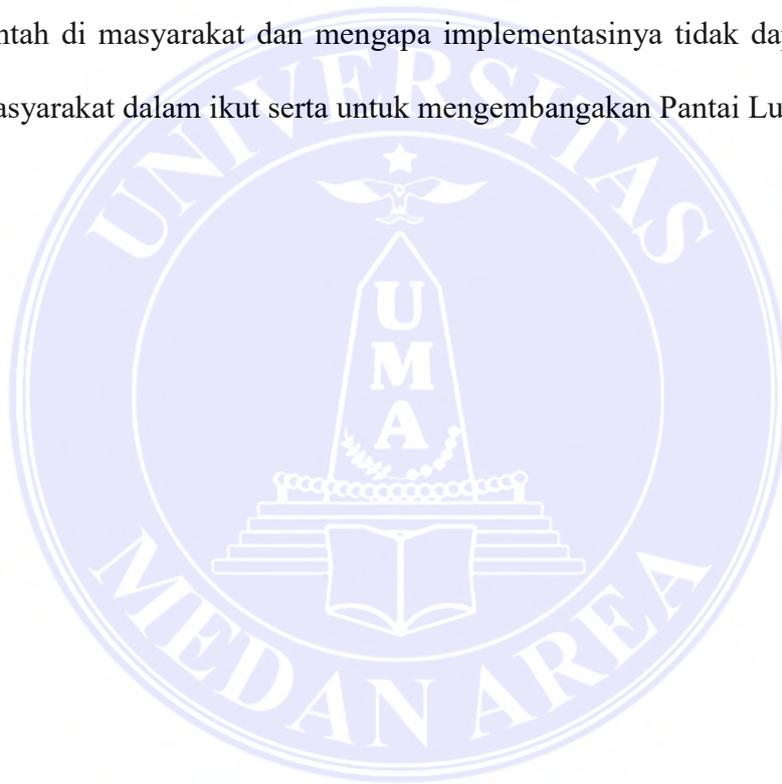
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam bentuk wawancara dan dirancang menjadi sebuah gambaran yang peneliti terhadap masalah yang diangkat dan menjadikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dari kebijakan pariwisata ini didalam masyarakat. Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, maka peneliti akan menarik kesimpulan dari narasumber apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan yang diterapkan pemerintah di masyarakat dan mengapa implementasinya tidak dapat diterapkan oleh masyarakat dalam ikut serta untuk mengembangkan Pantai Lumban Bulbul.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Melalui pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menuliskan tentang tujuan kepariwisataan yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan teori William Dunn yang mengelompokkan dalam 6 indikator yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan.

Efektivitas dalam mengembangkan wisata Pantai Lumban Bulbul sudah mencapai hasil yang baik pada peluang usaha yang ada di Desa ini. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui kegiatan wirausaha. Efisiensi dari perangkat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan Pantai Bulbul tetap terjaga perangkat Desa Lumban Bulbul membentuk suatu Unit Pengelola Sampah (UPS) meskipun pelaksanaannya masih terkendala akibat kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi menjaga kebersihan. Kecukupan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Lumban Bulbul ini masih rendah . terbukti dengan kurangnya minat anak usia muda dalam meningkatkan jenjang pendidikan. Banyak anak yang malas untuk sekolah dikarenakan sudah terbiasa mencari uang sejak dini. Hal ini berkaitan dengan Perataan dalam meningkatkan SDM melalui program pelatihan masih belum tepat sasaran, yang dimana pemerintah hanya melibatkan beberapa pihak saja tapi tidak mengikutsertakan

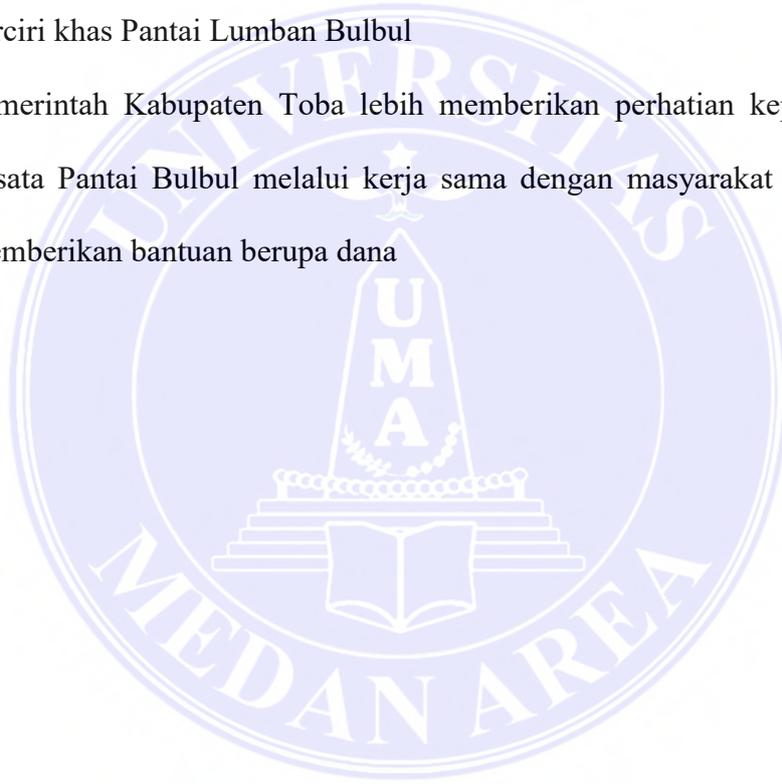
masyarakat yang seharusnya diarahkan agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang rendah mengakibatkan Responsivitas masyarakat dalam meningkatkan wisata ini belum maksimal karena kesadaran masyarakat yang kurang. Responsivitas masyarakat akan tanggung jawab dalam mengembnagkan wisat desa ini belum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyrakat yang sulit untuk dihimbau dan diajak kerjasama. Pola pikir yang hanya mementingkan diri sendiri dan menghiraukan himbauan dari perangkat desa. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang usaha dari kegiatan wisata di Pantai Lumban Bulbul ini menimbulkan efek yang kurang baik dari kegiatan wisata tersebut hal ini dikarenakan Ketepatan dalam pengelolaan Pantai Lumban Bulbul ini kurang baik yang mengakibatkan menurunnya kualitas Pantai Lumban Bulbul.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi proses pengembangan objek wisata pantai Lumban Bulbul yaitu karena pencemaran air danau Toba dan eceng gondok. Air yang ada di Pantai Bulbul ini memiliki warna yang keruh dan bau amis. Kemudian kualitas air Danau Toba menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan eceng gondok. Pembangunan sarana dan prasarana di desa ini masih kekurangan dana. Seperti yang diketahui semua Sarana dan Prasarana itu disediakan oleh masyrakat itu sendiri. Yang artinya selama proses pembangunan dan pengembangan objek wisata ini belum ada campur tangan dari pemerintah. Sebenarnya masyarakat sudah menurunkan proposal untuk proses pembangunan objek wisata ini namun belum ada hasil dari proposaal tersebut. Kemudian tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Masyarakat dan pemerintah kadang tidak memiliki tujuan yang sama dalam pengembangan Pantai Bulbul.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam pengembangan Pantai Bulbul agar lebih baik ke depannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan fungsi dari Pokdarwis sehingga pengembangan Pantai Bulbul lebih terarah
- 2) Melatih masyarakat agar lebih terampil lagi dalam membuat suatu karya tangan yang bisa dijual kepada wisatawan sebagai sebuah souvenir yang berciri khas Pantai Lumban Bulbul
- 3) Pemerintah Kabupaten Toba lebih memberikan perhatian kepada destinasi wisata Pantai Bulbul melalui kerja sama dengan masyarakat lokal maupun memberikan bantuan berupa dana



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah Y.A, dan Rusfiana Y. 2016. *Teori Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anderson, James.1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Renhart and Winston.
- Anggara, S. 2016. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia
- Antariksa, B. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata*. Malang: Intrans Publishing
- Arifin, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- A.H Karyono. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: Grasindo
- Bambang. 2012. *kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gava Media.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gayatri, G. Putu. 2005. *Sosiologi Priwisata*, Yogyakarta: Bandung
- Howlett, Mand Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy cycles and policy subsystem*. New York: Oxford University Press.
- Nur, Indrianto, dan Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Meyers K. 2017. *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Jakarta: Uneso Office
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Pasolong. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implentasi)*. Bandung: Alfabeta

- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ratman, D. R. 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019*. Jakarta: Pesona Indonesia
- Subarsono A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Thoha M, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Yogyakarta: Prenadamedia
- Umar H. 2012. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurnal
- Hengky, Nora, 2019. *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Toba Samosir*. Jurnal manajemen administrasi perkantoran.
- Rosita, T& Yuniati T. 2016. *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*. 5(1), 1-20.
- Soebagyo, 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. *Jurnal Liquidity*. 1(2).
- Umar Z, 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah*. *Jurnal analisis kebijakan dan pelayanan publik*. 3 (1).

Skripsi

Frintin Anggraini. 2010. *Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Representative dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara)*.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

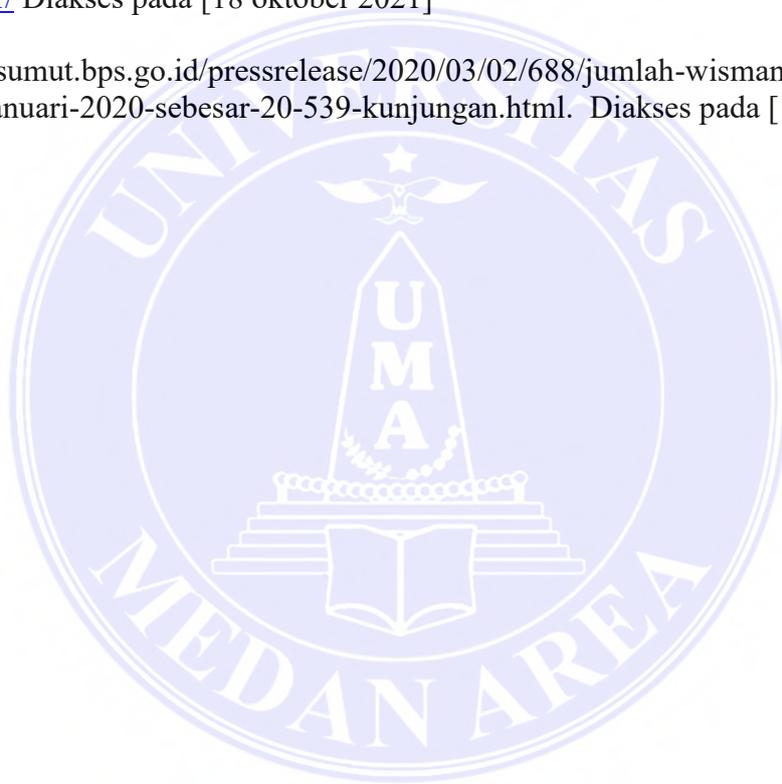
Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata.

Website

http://disbudpar.sumutprov.go.id/wilayah_kota_kabupaten/kabupaten-toba-samosir/ Diakses pada [18 oktober 2021]

<https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2020/03/02/688/jumlah-wisman-sumatera-utara-januari-2020-sebesar-20-539-kunjungan.html>. Diakses pada [17 oktober 2021]



Lampiran

Panduan Wawancara

Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Lumban Bulbul Balige Kabupaten Toba

A. Identitas Informan

Nama :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :
Tempat/waktu :

B. Pedoman Wawancara kepada Kepala Desa Lumban Bulbul

1. Peran apa yang perangkat desa lakukan untuk wisata Pantai Lumban Bulbul Balige?
2. Apakah upaya yang dilakukan perangkat desa Lumban Bulbul dalam menjaga kebersihan objek wisata Pantai Lumban Bulbul?
3. Apakah usaha tersebut efektif dalam mengelola Pantai Lumban Bulbul ini?
4. Apakah masyarakat turut berperan dalam menjaga kebersihan Pantai Lumban Bulbul
5. Bagaimana Tingkat perekonomian di desa Lumban Bulbul ini sebelum adanya objek wisata yang sekarang?
- 6.
7. Menurut bapak apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari wisata ini?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan perangkat Desa Lumban Bulbul untuk memperdayakan objek pariwisata Pantai Lumban Bulbul Balige dari dulu sampai sekarang?

9. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta memberdayakan objek pariwisata Pantai Lumban Bulbul Balige dan seberapa besar pengaruhnya?
10. Bagaimana pendapat anda tentang diberdayakan objek pariwisata Pantai Lumban Bulbul Balige melalui partisipasi masyarakat?
11. Adakah hubungan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat atau lembaga- lembaga lain dalam memberdayakan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige?
12. Bagaimana kondisi Sarana dan Prasarana wisata Pantai Lumban Bulbul saat ini?
13. Bagaimana pengelolaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige dengan mengikutsertakan peran masyarakat?
14. Menurut bapak apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari wisata ini?
15. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige ini? Apakah dari politik, ekonomi atau Sumberdaya Manusianya?
16. Apakah yang menjadi kelemahan pada Dinas Pariwisata Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
17. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya wisata Pantai Lumban Bulbul Balige?
18. Apakah wisata Pantai Lumban Bulbul Balige menjadi pendorong roda perekonomian masyarakat sekitar?

19. Bagaimana peran yang dilakukan perangkat Desa Lumban Bulbul untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberdayakan potensi Pantai Lumban Bulbul Balige?
20. Apakah dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat melalui pendidikan masyarakat?

C. Pedoman wawancara kepada Pengelola Objek Wisata

1. Siapakah yang mengelola objek wisata ini? Apakah itu masyarakat sendiri, pihak dari luar (swasta) atau ada campur tangan dari pemerintah?
2. Siapakah yang menyediakan sarana dan prasarana yang ada di Pantai Lumban Bulbul ini?
3. Apakah pemerintah ikut membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana di objek wisata ini?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan objek wisata Pantai Lumban Bulbul Balige serta dampak terhadap masyarakat Lumban Bulbul?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh objek wisata Pantai Lumban Bulbul?

D. Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana dampak dari kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengatur regulasi kegiatan wisata di Pantai Lumban Bulbul Balige? apakah berdampak baik atau sebaliknya?
2. Bagaimana perekonomian masyarakat sebagai pelaku usaha yang pendapatan aslinya dari Pantai Lumban Bulbul Balige ini?

3. Apakah ada faktor yang membuat masyarakat sulit dalam mengembangkan ekonomi?
4. Untuk saat ini hal apa yang masyarakat inginkan kepada pemerintah agar masyarakat lebih dipermudah dalam melakukan usaha bisnis atau pun penyediaan jasa wisata Pantai Lumban Bulbul?



LAMPIRAN DOKUMENTASI

Kantor Kepala Desa Lumban Bulbu



Fasilitas Penginapan/Homestay di Pantai Lumban Bulbul



Arena bermain ATV



Fasilitas Pondok, Kamar mandi, Warung makan dan lahan parkir





Wahana permainan Pantai Lumban Bulbul





Lampiran Dokumentasi Wawancara



Lampiran Surat

	PEMERINTAH KABUPATEN TOBA KECAMATAN BALIGE KANTOR DESA LUMBAN BULBUL
Lumban Bulbul, 08 Pebruari 2022	
Nomor : 470/4a /2015/2022	Kepada Yth,
Sifat : Penting	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan politik
Lampiran : ---	Universitas Medan area
Hal : Pengambilan Data/Riset	di -
<u>Tempat</u>	
Surat Saudara Nomor : 1061 / FIS.2/01.10/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021	
Perihal Pengambilan Data/Riset di Desa Lumban Bulbul atas nama ;	
Nama : Yessi Meliaki Simaringga	
Alamat : Pematang Silimahuta Kabupaten simalungun	
Pekerjaan : Mahasiswa	
NIM : 188529168	
Program Studi : Administrasi Publik	
Jenjang : Sastra - I (S1)	
Pemerintah Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba , menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut sudah benar melaksanakan pengambilan Data/Riset tentang Pariwisata sesuai dengan yang Bapak/Ibu tugaskan di Desa Lumban Bulbul.	
Demikian hal ini kami sampaikan,	
 KEPALA DESA LUMBAN BULBUL MELVA RANJAITAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jln. DR. TD. Pardede No. 02 – Balige 22311 Sumatera Utara
Telp/Fax (0632) 322679 website : www.wisatatobasa.com

Nomor : 556/081/Parbud/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Balige, 10 Februari 2022
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Medan Area
di
Medan

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area Nomor : 1061/FIS.2/01.10/XII/2021 tanggal 20 Desember
2021 perihal Izin Pengambilan Data, dengan ini bahwa:

Nama : Yessi Meliaki Simaringga
NPM : 188520168
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Pantai
Lumban Bulbul Balige kabupaten Toba

Memberikan izin melaksanakan Pengambilan Data di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Toba untuk kebutuhan Penulisan Skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOBA

